

TAK HANYA DIIKAT

## Tangan Bocah di Bojonggede Juga Pernah Disetrika Ayah Tiri

**BOJONGGEDE (IM)** - Perbuatan RR (24) menyekap serta mengikat tangan dan kaki anak tirinya dengan tali plastik membuat warga Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor itu harus berurusan dengan penegak hukum. Tindak kekerasan lain yang dilakukannya pun terungkap, yakni menyudut dengan rokok dan menyetrikan tangan korban.

Ketua RW10 Desa Ragajaya, Syarif mengungkapkan, RR yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) itu kerap kali melakukan tindak kekerasan terhadap anak tiri dan istrinya. "Menurut tetangganya, anak itu diikat dari pagi hari, sebelum berangkat kerja sebagai ojol. Terkadang pas sudah pulang, ada orang yang mendengar, terdengar dipanggil warga lainnya buat menyelamatkan anak itu," kata Syarif, Rabu (6/4).

Berdasarkan keterangan tetangga pelaku dan korban, kekerasan semacam ini sudah beberapa kali terjadi. "Katanya pernah disudut rokok, disetrikan juga pernah," kata Syarif.

### Pelaku Sering Marah

Sementara istri pelaku sekaligus ibu kandung korban, Ayu mengakui bahwa suaminya kerap marah karena korban dianggap nakal. "Sudah saya ingatkan supaya jangan diikat. Karena namanya juga anak-anak mah nakal biasa. Saya

sudah minta ikatannya dibuka tapi dia nggak mau," kata Ayu.

Ayu mengakui bahwa kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Ayu pun tidak ragu mengungkapkan jika dirinya juga kerap dipukuli suaminya. Bahkan, sehari sebelum diikat dengan tali plastik, tangan kanan korban sempat disetrikan pelaku lantaran sempat menumpahkan air panas kepada anak kandung pelaku.

"Kalau dipukul sudah sering. Alasan disetrikan karena supaya anak saya ngerasain sama yang dirasain anak dia. Banyak luka ke anak saya bekas disetrikan. Ini juga udah dua kali dia urusan sama polisi, mudah-mudahan jera deh," katanya.

Seperti diberitakan, RR diamankan karena tega mengikat kaki dan tangan anak tirinya yang masih berusia 7 tahun menggunakan tali plastik. Warga yang mengetahui kejadian ini pun, mendobrak rumah mereka untuk menyelamatkan bocah malang itu yang sedang dalam posisi berdiri dengan kaki dan tangan terikat.

Kapolsek Bojonggede, AKP Dwi Susanto menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin (4/4) sekitar pukul 22.00 WIB. "Anggota langsung ke TKP dan mengamankan pelaku yaitu ayah tiri dari korban. Kaki dan tangan diikat tali plastik," katanya, Selasa (5/4). ● **pra**

# 8 Nusantara



### SAFARI RAMADHAN WAGUB JABAR

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kiri) bersama Pimpinan Pondok Pesantren Candangpinggan KH Buya Syakur Yasin (kanan) melihat instalasi pengolahan sampah saat Safari Ramadhan di Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/4). Dalam Kunjungannya Wagub berharap pondok pesantren bisa turut berperan untuk menunjang kawasan Segitiga Rebana dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

## Pakar Kebijakan Publik Kritisi Program Samisade

Di mata masyarakat, program Samisade ini berbau politisi atau politis khususnya pencitraan kinerja Bupati Bogor, Ade Yasin. Di beberapa kesempatan, ada beberapa Kades yang berpolitik praktis mendukung Bupati Ade Yasin untuk lanjut dua periode, kata pengamat kebijakan publik Yusfitriadi.

### CIBINONG (IM)-

Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi mengkritisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring proyek pembangunan infrastruktur yang sudah menyerahkan (LPJ) laporan pertanggung jawabannya. Sementara itu, di Tahun Anggaran 2021, Pemkab Bogor malah menaikkan anggaran Samisade hingga Rp 395 miliar untuk disalurkan ke 415 desa, hingga Yusfitriadi meminta ada

### Rp319 miliar untuk program Samisade di 349 desa guna

meningkatkan untuk skenario kedua, jika anggaran dana BOS APBN masih tidak jelas besarnya seperti yang terjadi pada penyusunan APBD Kota Bogor 2022, maka juknis yang akan digunakan adalah juknis tahun sebelumnya.

"Dengan dua skenario ini kami berharap bahwa tahun depan tidak terulang lagi masalah molornya pencairan gaji guru honorer. Termasuk, opsi untuk memasukkan honor atau gaji guru ini ke dalam APBD Kota Bogor, sedangkan BOS dialokasikan penuh untuk operasional," terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan, Komisi IV sebelumnya juga telah menggelar rapat dengan Disdik Kota Bogor terkait isu belum terbayarkannya gaji guru ini. Karnain menyampaikan akan memantau terus progress pencairan, termasuk kesiapan proses

penundaan dan juga refocusing.

"Khawatir bakal dipaksanakan dan anggaran Samisade tidak terserap di Tahun Anggaran 2022 karena tidak beresnya LPJ Samisade di Tahun Anggaran 2021 dan dugaan kebocoran anggaran, saya sarankan program tersebut di tahun ini ditunda dan anggarannya difocusing ke kegiatan lain hingga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Rabu (6/4).

la menerangkan bahwa rendahnya penyerahan LPJ program Samisade, bersumber dari rendahnya perencanaan hingga monitoring, ditambah lagi payung hukum yang tidak memadai karena program Samisade hanya dipanggi peraturan daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2021.

"Mulai dari perencanaan yang tak terbuka, lalu pelaksanaan dan pelaporan yang tidak

jelas, monitoring atau evaluasi yang lemah membuat keadaan seperti saat ini. Apalagi, menurut saya Perda nomor 8 Tahun 2021 tersebut tidak kuat sebagai payung hukum yang tepat, karena tidak ada 'cantolan' undang-undang di atasnya hingga jelas ada kepastian hukum kalau ada Kepala atau Pemesan yang menyimpangkan anggaran Sami Sade," terangnya.

Yus sapaan akrabnya menuturkan bahwa di mata masyarakat, program Samisade berbau politisi atau politis khususnya pencitraan kinerja Bupati Bogor Ade Yasin. Di beberapa kesempatan, paparnya ada beberapa Kades yang berpolitik praktis mendukung Bupati Ade Yasin untuk lanjut dua periode.

"Samisade saya lihat dipaksakan untuk pencitraan Bupati, partai politik maupun orang-orang dekatnya, padahal para

Kades punya fraksi atau kecenderungan masing-masing di tingkat partai politiknya, hingga kalau itu benar-benar terjadi maka akan menjadi boomerang. Saya ingatkan, Kades bisa terkena atau terancam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," tutur Yus.

Diwawancara terpisah, Kepala Inspektora Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi membenarkan bahwa dari 349 desa, baru 47 Pemesan yang sudah menyerahkan LPJ Sami Sade.

"Saya sudah sampaikan kepada Pemesan yang belum menyerahkan LPJ, bahwa anggaran Samisade di Tahun Anggaran 2022 tidak akan digulirkan kalau LPJ dan pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya tidak tuntas. Saya juga akan monitoring dan evaluasi ke desa-desa yang tahun lalu mendapatkan program Samisade," tukas Ade Jaya Munadi. ● **gio**

## Gubernur Jabar Ajak Generasi Muda Optimistis Raih Indonesia Emas

**BANDUNG (IM)** - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengajak mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi pemuda optimistis dan damai demi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang diprediksi empat terkuat dunia.

"Pertama jangan ada generasi stunting yang tidak produktif dan kompetitif. Ini syarat untuk mencapai empat besar ekonomi dunia," kata Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu (6/4).

Ajakan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pemateri dalam acara talkshow Safari Iman Ramadhan (Safir) 1443 H bertajuk Para Pemuda Intelektual Muslim Membangun Negeri yang Berprestasi Masjid Kampus UII, Yogyakarta. Ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menduduki posisi empat di dunia.

Saat itu, Indonesia diperkirakan hanya akan di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India namun untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Oleh karena itu, Ridwan Kamil mengajak para generasi muda untuk percaya diri mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level global.

Dia menyebut ada tiga syarat yang harus dicapai Indonesia untuk

bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Syarat pertama adalah anak-anak Indonesia harus sehat, tidak stunting ini dilakukan agar kelak ketika tumbuh dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang kompetitif dan produktif.

Syarat yang kedua menurut Ridwan Kamil adalah pertumbuhan ekonomi harus stabil. Paling tidak ada di atas lima persen setiap tahunnya. "Tapi harus kuasai juga tiga bidang ekonomi, yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif," kata dia.

Satu lagi syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi sosial politik yang kondusif. Ridwan Kamil kemudian memberikan contoh apa yang sekarang terjadi antara Ukraina dan Rusia.

Kedua negara itu ia sebut sedang dicabut nikmat kebebasan bernegara oleh Allah SWT agar yang terjadi adalah kehancuran di sana sini. Sehingga Ridwan Kamil mengajak agar hal serupa tidak harus terjadi di Indonesia. Mantan Wali Kota Bandung itu menilai para pemuda punya peran penting dalam hal itu.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salat tarawih berjamaah dan memberikan tausiah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (5/4) malam. ● **pra**

IDN/ANTARA



### TARGET PENURUNAN ANGKA STUNTING

Kader PKK mengukur lingkaran kepala balita di Posyandu Bougenville, Pemancar, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka stunting pada 2023 dan terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes, diantaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi.

TARIK MINAT WARGA DIVAKSIN BOOSTER

## Gerai Vaksin Alun-alun Kota Bogor Tawarkan Paket Sembako

**BOGOR (IM)** - Untuk menarik minat warga agar mau divaksin, gerai vaksin di Alun-alun Kota Bogor menawarkan paket sembako bagi 100 warga pertama yang divaksin booster. Gerai vaksin di Alun-alun Kota Bogor sendiri diselenggarakan atas kerjasama Polresta Bogor Kota dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor didukung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) serta Forum Ormas Bogor Bersatu (FOBB) membuka gerai vaksin di alun-alun Kota Bogor untuk mendorong angka vaksin booster pada Rabu (6/4) siang.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kerjasama gerai vaksin ini untuk menggeber vaksin booster. Vaksin booster bukan hanya untuk para pemudik, tapi bagi masyarakat yang akan menerima kerabat keluarga dari luar kota. "Tujuannya agar angka Covid-19 tetap terjaga sebelum dan setelah Idul Fitri. Saat ini angka vaksin booster masih di bawah 20 persen, maka dari itu bersama semua komunitas mendukung program vaksin booster ini," ungkap Susatyo kepada wartawan.

Susatyo menjelaskan, pihaknya menargetkan sebanyak-banyaknya, setidaknya vaksin booster bisa mencapai angka 50 persen sebelum Idul Fitri nanti.

Sementara saat mudik nanti, jika ada warga yang kedatangan belum divaksin booster akan dipulangkan. "Kami akan lihat pelaksanaan pemeriksaan titik cek poin apakah saat operasi ketupat atau seminggu sebelum Lebaran diperketat di batas kota. Stok vaksin Kota Bogor sangat cukup mengingat angka booster 40 sampai 50 persen, baik Polresta Bogor Kota, Dinkes dan Kodim digabungkan stoknya ada sekitar 60 ribu dosis vaksin," tambah Susatyo.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Fai Rusydi mengatakan, hari ini merupakan ikhtiar dari Polresta Bogor Kota bersama Kadin, seluruh Ormas dan KNPI, mudah-mudahan menjadi hal baik bagi masyarakat Kota Bogor agar bersatu untuk menambah imunitas serta saling melindungi dari Covid-19.

"Hari ini untuk 100 orang pertama yang divaksin mendapatkan paket sembako. Kemudian sore harinya kami ada bagi-bagi takjil di sini. Saya mengajak semua saling berkolaborasi mewujudkan herd immunity," jelasnya.

Ketua KNPI Kota Bogor, Sapti Bela Alfary mengatakan, dirinya berharap gerai vaksin booster ini terus berlanjut hingga tercapai angka sesuai target yaitu 50 persen sebelum Idul Fitri 2022. ● **gio**

## DPRD Minta Tunggakan Gaji Guru Honorer Kota Bogor Segera Dibayar

**BOGOR (IM)** - Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta, kepada Disdik dan BKAD untuk mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan gaji guru honorer yang tertunda.

"Kami minta akhir pekan ini bisa diselesaikan. Tahapan sudah di BKAD, untuk itu segera proses admistrasinya dan upayakan Jum'at besok atau maksimal Senin depan sudah pencairan. Kasihan para guru honorer kita. Mereka sudah bekerja maksimal tapi 3 bulan belum gajian. Apalagi, hari ini kebutuhan hidup semakin besar," kata Atang Trisnanto usai rapat bersama komisi IV DPRD, Disdik dan BKAD Kota Bogor, Rabu (6/4).

Atang menyampaikan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Disdik Kota Bogor, ada sekitar 486 guru dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan gaji atau honor sejak awal tahun. Ia meminta agar kedepannya, kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

Sehingga, berdasarkan hasil rapat tersebut disiapkan dua skenario penggunaan BOS APBN untuk tahun kedepannya.

"Skenario pertama, jika ang-

garan dana BOS APBN sudah jelas besarannya sebelum penetapan APBD Kota Bogor, saya meminta agar pihak sekolah dan disdik mempercepat penyusunan RKA dan penginputan anggaran ke SIPD," tutur.

Atang membeberkan, sedangkan untuk skenario kedua, jika anggaran dana BOS APBN masih tidak jelas besarannya seperti yang terjadi pada penyusunan APBD Kota Bogor 2022, maka juknis yang akan digunakan adalah juknis tahun sebelumnya.

"Dengan dua skenario ini kami berharap bahwa tahun depan tidak terulang lagi masalah molornya pencairan gaji guru honorer. Termasuk, opsi untuk memasukkan honor atau gaji guru ini ke dalam APBD Kota Bogor, sedangkan BOS dialokasikan penuh untuk operasional," terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan, Komisi IV sebelumnya juga telah menggelar rapat dengan Disdik Kota Bogor terkait isu belum terbayarkannya gaji guru ini. Karnain menyampaikan akan memantau terus progress pencairan, termasuk kesiapan proses

pencairan tahun depan agar tidak kembali terulang.

"Kami akan pantau terus progress hasil rapat tadi, baik tentang target pencairan maupun pengawalan terhadap pelaksanaan pencairan awal tahun depan agar tidak mengalami keterlambatan. Hasil kordinasi Disdik dengan Kemendikbud, juklak juknis tahun sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk proses admistrasi berikutnya," jelas Karnain.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi menjelaskan, bahwa belum terbayarkannya gaji yang bersumber dari BOS APBN dikarenakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kemdikbud baru turun pada pertengahan Februari 2022.

"Kami baru bisa melakukan sosialisasi, bimtek kepala sekolah, serta proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat sekolah setelah juklak juknis dari kemendagri keluar. Setelah RKAS selesai, baru diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Insha Allah tahapan tersebut sudah kami upayakan diselesaikan maksimal mungkin," tegas Hanafi. ● **gio**



### CAPAIAN VAKSIN BOOSTER DI BANDUNG

Warga antre untuk menjalani vaksinasi booster COVID-19 di UPT Puskesmas Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4). Vaksinasi booster di Kota Bandung telah mencapai 21 persen dan ditargetkan menyentuh angka 30 persen pada April 2022.

## Bupati Bogor Ade Yasin, Ikuti RDP Banggar DPR RI

**BOGOR (IM)** - Bupati Bogor, Ade Yasin, yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Rapat itu membahas dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terhadap peningkatan kualitas belanja daerah serta pengaruhnya terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

Bupati Ade Yasin bersama Sekretaris Jenderal APKASI, Adnan Purihtu Ichsann beserta Dewan Pengurus APKASI lainnya menyampaikan pendapatnya mengenai UU HKPD, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, lantai 1 Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4). Ade Yasin bersama yang lainnya diterima langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

Ade Yasin menjelaskan, pihaknya telah juga membicarakan Undang-Undang HKPD dengan APKASI

sekaligus sudah membahas tentang RDP tersebut. "Kami sudah membahas Undang-Undang HKPD ini di APKASI dan sudah disampaikan apa yang kami bahas pada RDP kali ini. Ada hal-hal yang harus dipertajam, terutama dengan adanya UU HKPD ini, apa kabarnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi segala sesuatunya diatur oleh pusat sampai ke hal-hal yang detail," ujar Ade Yasin.

Lebih jauh Ade Yasin menilai, jika dipandang kalau memang banyak perubahan, sebaiknya juga Undang-Undang Otonomi Daerah dikaji kembali. Karena apa, karena kita semua, seperti halnya kepala yang dilepas kakinya diikat," tegas Ade Yasin.

Misalnya, lanjut Ade, untuk mengangkat staf dan kepala seksi di Disdukcapil saja harus persetujuan Dirjen di Kemendagri. Padahal yang tahu bagaimana kapasitas ASN di daerah adalah pimpinan daerah. Namun dengan banyaknya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah, diupamakan, pimpinan daerah merasa bahwa kakinya sama dengan ini diikat. ● **gio**

## Sekda Burhanudin Ikuti Rapat Percepatan Penanganan Covid-19

**BOGOR (IM)** - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengikuti Rapat Koordinasi menurunkan laju penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui percepatan pelaksanaan vaksinasi booster di wilayah Jabodetabek melalui zoom meeting, di ruang Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (5/4).

Burhanudin didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti arahan beberapa narasumber di antaranya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Satgas Penanganan Covid-19 RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, Mabes TNI, dan Mabes Polri.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, dalam arahannya mengatakan, pada akhir Ramadhan ini masyarakat kita akan melakukan mudik Lebaran. Presiden Joko Widodo sudah

memperbolehkan masyarakat mudik pada Lebaran, dengan persyaratan dan ketentuan. Oleh karena itu, berbagai persiapan harus kita lakukan untuk meningkatkan capaian vaksinasi hingga dosis 3.

"Presiden Joko Widodo memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun 2022. Namun, hanya yang sudah divaksin lengkap dan mendapat booster atau vaksinasi dosis ketiga yang boleh pulang ke kampung halaman. serta tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, karena pandemi Covid-19 belum berakhir," kata Safrizal.

Ia menambahkan, agar menjadikan vaksin booster sebagai syarat melaksanakan aktivitas berbagai hal, di antaranya untuk menyaksikan kompetisi olahraga, dan sebagai persyaratan untuk mudik. Vaksin booster menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi peningkatan kasus Covid-19 pasca arus mudik Lebaran," kata Safrizal. ● **gio**